

Judul : Tambang rakyat legal, awas, mafia berganti baju
Tanggal : Jumat, 22 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tambang Rakyat Legal Awat, Mafia Berganti Baju



Beniyanto Tamoreka

ANGGOTA Komisi XII DPR Beniyanto Tamoreka mengingatkan Pemerintah berhati-hati melegalkan tambang mineral dan batubara (minerba) ilegal lewat skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kebijakan ini harus berbasis tata kelola ketat, bukan sekadar membenaran aktivitas liar.

Dia menegaskan, legalisasi hanya dapat dijalankan selektif.

"Kalau semua dilegalkan tanpa kerangka pengawasan, ini justru akan menjadi bom waktu bagi sektor minerba," ujarnya, Rabu (20/8/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan, Pemerintah akan memberi ruang bagi masyarakat menanambang secara legal melalui koperasi, sekaligus memberantas praktik tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun dari 1.063 tambang ilegal.

Beniyanto mengatakan, IPR hanya relevan untuk galian C seperti Asbes, Batu Tullis, Batu Permata, Batu Kapur/Gamping, Batu Apung, Nitrat, Fosfat, yang skalanya kecil. Sedangkan untuk komoditas strategis seperti nikel, bauksit, dan batu bara, risikonya jauh lebih besar.

Untuk itu, Beniyanto menekankan, legalisasi harus berjalan paralel dengan penguatan penegakan hukum (gakkum). Sebab, mafia tambang selama ini menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, sekaligus menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

"Jika gakkum tidak diperkuat, mafia tambang hanya akan berganti baju menjadi 'legal'. Negara bisa rugi dua kali, baik dari sisi penerimaan maupun dari kerusakan lingkungan," kata politikus Golkar ini.

Komisi XII DPR, kata Beniyanto, mengajukan sejumlah prasyarat teknis agar kebijakan legalisasi dapat berjalan efektif. Antara lain, pemetaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berbasis data geologi untuk mencegah tumpang tindih dengan konsesi resmi, kelembagaan koperasi atau BUMD sebagai pengelola, guna menjamin transparansi rantai pasok.

Kemudian, standar lingkungan dan batas produksi yang ketat, digitalisasi pencatatan produksi dan distribusi untuk menekan kebocoran penerimaan negara, sinergi lintas kementerian dan aparat hukum agar konsistensi penegakan hukum terjaga.

Beniyanto menilai, motivasi Pemerintah untuk menata tambang ilegal dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi lokal dan penerimaan negara. Dengan begitu, kebijakan ini harus dikawal ketat agar tidak menyimpang dari prinsip keberlanjutan.

Legalisasi tambang rakyat bisa menjadi solusi ekonomi daerah, jika tata kelola dan gakkum berjalan disiplin.

"Kami akan mengawal penuh agar kebijakan ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan kepentingan Indonesia Emas 2045," tandasnya. ■ TIF